

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

Syahidin¹, M. Syafii²

^{1,2} Universitas Sumatera Utara

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara
e-mail: ¹syahidin161@gmail.com, ²syafiimuhammad91@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan tekanan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, baik secara langsung maupun melalui kinerja keuangan daerah. data penelitian merupakan data sekunder dari publikasi BPS di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, selanjutnya variabel dianalisis dengan memanfaatkan analisis jalur yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan langsung dari variabel pada model penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel stress desentralisasi dan fiskal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, variabel desentralisasi fiskal dan fiskal stress secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan daerah, dan variabel kinerja keuangan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi pasca desentralisasi fiskal. pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya, dengan cara pengembangan aktivitas ekonomi di berbagai bidang dan berbasis komoditas unggulan daerah, melakukan intensifikasi danfikasi penerimaan pendapatan daerah dan disertai dengan kinerja keuangan yang efisien.

Kata Kunci: Desentralisasi fiskal, Fiskal Stress, Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Aceh telah melaksanakan otonomi daerah sejak tahun 2006, yang tentunya membutuhkan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan ekonomi antar kabupaten/kota di Aceh masih merupakan upaya bersama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota kontribusi ekonomi pusat terus mendominasi dan meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar Rp. 9,82% di Kota Banda Aceh, dan yang terendah di Kota Loksumawe sebesar Rp. -20,34 % . sesuai dengan di Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Kab/Kota Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	4.08	5.16	4.69	4.33	4.31	4.55	4.42	4.24	4.60	0.15
Aceh Singkil	4.30	4.18	4.49	3.72	3.72	4.16	3.92	3.98	3.99	-1.16
Aceh Selatan	4.35	5.48	5.32	4.51	4.23	4.64	3.93	4.53	4.43	-0.05
Aceh Tenggara	5.42	4.61	4.89	3.84	4.03	4.24	5.03	3.26	4.23	-0.17
Aceh Timur	2.60	2.66	1.08	-0.51	-5.98	-1.16	4.34	4.20	4.42	1.79
Aceh Tengah	4.93	4.34	5.44	4.05	4.23	4.59	4.05	4.22	3.51	-1.21
Aceh Barat	2.40	0.56	3.90	3.36	4.58	2.92	13.23	10.14	4.99	1.87
Aceh Besar	2.59	3.91	4.16	4.08	4.02	4.05	4.01	3.78	4.35	0.31
Pidie	4.15	4.52	4.24	4.03	4.82	3.88	4.42	4.16	4.43	-0.14
Bireuen	3.80	3.95	4.03	2.15	3.80	4.04	4.23	4.22	5.00	-0.94
Aceh Utara	3.88	1.59	-1.74	-3.59	-11.69	0.07	2.30	4.77	3.48	0.97
Aceh Barat daya	2.96	1.91	2.33	1.10	3.34	4.56	4.46	4.61	4.75	-0.52
Gayo Lues	4.55	5.43	3.86	3.87	3.93	4.13	4.70	1.28	1.26	0.88

Aceh Tamiang	1.53	3.96	5.04	2.40	2.63	2.83	4.00	4.25	4.55	0.42
Nagan Raya	2.62	3.70	3.40	3.42	4.17	4.05	3.95	4.29	6.77	3.54
Aceh Jaya	4.16	3.98	3.20	3.69	3.71	3.89	4.00	4.04	3.75	-0.62
Bener meriah	4.47	5.23	5.39	4.45	4.82	4.43	4.09	4.16	4.32	0.26
Pidie Jaya	4.13	4.33	4.55	3.63	4.84	3.70	5.80	4.63	4.08	-1.11
Banda Aceh	7.07	7.12	7.09	7.96	7.35	7.37	9.17	4.02	9.82	9.59
Sabang	3.84	4.18	4.23	4.06	4.33	4.85	6.07	5.87	5.82	-1.15
Langsa	4.34	4.72	4.57	4.24	4.40	4.49	4.43	4.33	4.39	-1.06
Lhokseumawe	- 2.39	1.20	-1.14	-7.39	- 20.34	-1.52	2.19	3.78	3.98	-1.45
Subulussalam	4.33	4.68	4.96	5.11	4.42	4.69	4.93	4.42	4.42	1.97
Aceh	3.28	3.85	2.61	1.55	-0.73	3.29	4.18	4.61	4.14	-0.37

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dari keterangan tabel diatas dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan tingkat PDRB perkapita tertinggi Kota Banda Aceh mencapai Rp. 9.82 juta pertahun ditahun 2019 dan yang paling terendah adalah Kota Lhokseumawe Rp. -2034 juta pertahun ditahun 2015. Kemudian tingkat Provinsi PDRB perkapita tertinggi terlihat ditahun 2018 mencapai Rp. 4.61 juta pertahun. Dan terendah terlihat pada tahun 2015 mencapai Rp. -0.73 juta pertahun.

Todaro (2003) [1] Mengatakan bahwa apabila laju pertumbuhan meningkat maka keberhasilan pembangunan akan tercapai, namun akan muncul permasalahan pemerataan hasil pembangunan. Penelitian menyebutkan bahwa di Cina, Korea Selatan, Taiwan, Sri Lanka dan Kosta Rika membuktikan bahwa sebelumnya pendapatan daerah akan disertai dengan peningkatan kesenjangan pembangunan. Ketimpangan daerah jika dibiarkan akan memperlebar jurang pembangunan antara daerah kaya dan daerah miskin sehingga menyebabkan terjadinya migrasi dari daerah ke daerah kaya. Daerah memiliki berbagai perbedaan potensi yang dimiliki baik potensi alam, infrastruktur, sumber daya manusia dan investasi, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan. Salah satu indikator utama bahwa suatu daerah mampu berotonomi adalah dilihat dari kemampuan keuangannya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka menyediakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan. potensi masing-masing daerah. Daerah yang memiliki gaji yang signifikan dan bebas akan memiliki situasi yang lebih disukai daripada mereka yang mengandalkan cadangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih mudah karena mereka akan memiliki akses ke lebih banyak pendanaan dari bisnis mereka sendiri. Oleh karena itu , setiap pemerintah daerah mengharapkan daerah yang lebih mandiri. Besarnya derajat desentralisasi fiskal (DDF), khususnya dengan memanfaatkan variabel utama kemampuan keuangan daerah, dapat digunakan untuk menentukan apakah kabupaten atau kota mampu melaksanakan otonomi dengan baik.

Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh harus dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sebagai akibat otonomi daerah agar kemandirian dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan. daerah kini memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri dan harus dituntut untuk lebih mandiri agar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat menggali lebih banyak sumber pendapatan daerah. dengan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh fenomena yang dialami kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, jika tidak segera diatasi, dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah ekonomi makro. Ada tiga alasan utama sebagai tersebut :

1. Peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan berdampak pada penambahan angkatan kerja. Angkatan kerja dapat menyerap atau menciptakan lapangan kerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Selama tidak ada batasan untuk apa yang Anda inginkan dan butuhkan.
3. Upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung desentralisasi fiskal dan tekanan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh berdasarkan permasalahan tersebut di atas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Purba Bonaraja et al, (2021) [2] menyatakan bahwa perekonomian Indonesia tidak pernah luput dari pembangunan. Suatu proses yang dikenal sebagai pembangunan ekonomi daerah melibatkan pengelolaan sumber daya yang ada oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya, serta pembentukan struktur kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan perekonomian daerah. Basmar et al, (2021) [3] menyatakan bahwa aspek yang paling penting dari ekspansi ekonomi adalah sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia, tetapi yang lebih penting adalah efektivitasnya, bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Nainggolan et al, (2021) [4] menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan, dengan pertumbuhan ekonomi memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menjadi pemandu dan pendukung pembangunan ekonomi sementara masyarakat berperan utama dalam proses tersebut.

Kinerja Keuangan Daerah

Idris Patarai (2016) [5] Rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio kompatibilitas adalah beberapa ukuran kinerja yang digunakan dalam organisasi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan rasio efisiensi karena diamati bahwa setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota berusaha untuk meningkatkan efisiensi anggaran setiap tahun. Rasio efisiensi adalah rasio yang membandingkan berapa banyak uang yang dikeluarkan dan berapa banyak uang yang dihasilkan di daerah. Dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tujuan yang direncanakan, rasio yang lebih kecil lebih efektif dalam situasi ini.

Desentralisasi Fiskal

Sang Made Muryawan (2016) [6] Pengalihan wewenang dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi atau pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah atau daerah dikenal sebagai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal juga dapat diartikan sebagai pemberian wewenang kepada daerah untuk menyelidiki sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, dan wewenang untuk memutuskan pengeluaran rutin dan investasi. Singkatnya, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menetapkan aturan anggaran.

Fiskal Stress

Manafe, Ena, and Adu (2019) [7] Istilah "tekanan fiskal" atau "tekanan anggaran" mengacu pada tekanan yang ditempatkan pada anggaran karena pemerintah daerah menerima pendapatan anggaran yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kemandirian daerah. pemerintah tingkat yang lebih tinggi melanggar kewenangan pemerintah yang lebih rendah dan kekuasaan pemerintah yang lebih rendah tidak dapat menyediakan pendanaan yang memadai, ketika warga meningkatkan permintaan layanan pemerintah dan pendapatan daerah tidak dapat meningkat, atau ketika pendapatan daerah tidak dapat meningkat. Indeks upaya pajak dapat menunjukkan apakah suatu daerah mengalami tekanan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pemerintah untuk menyelidiki kemungkinan penerimaan pajak meningkatkan pendapatan daerah selama masa tekanan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Semeulue, Aceh Singkit, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Subulussalam. Kota Banda Aceh memenuhi variabel penelitian pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, tekanan fiskal, dan kinerja keuangan, dengan mempertimbangkan bahwa meskipun kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh berhasil melaksanakan otonomi daerah, masih terdapat disparitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antar daerah yang cukup signifikan. .

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*) 10 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, dan data cross section yang terdiri atas 23 Kabupaten/kota, sehingga merupakan pooled the data yaitu gabungan antara data time series (tahun 2011-2020 : 10 tahun) dengan data cross section 23 Kabupaten/Kota yang diperoleh dari publikasi BPS masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Teknik Analisis Data

Analisis jalur atau analisis jalur, yang merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda untuk memperkirakan kausalitas antara variabel yang diolah dengan program SPSS, adalah metode

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis jalur dipilih karena bentuk penelitian hubungan kausal, a hubungan kausalitas berjenjang, adalah model yang kompleks. Artinya suatu variabel dapat berfungsi sebagai variabel bebas dalam satu hubungan tetapi menjadi variabel terikat dalam hubungan lain karena hubungan kausalitas yang berjenjang. Gambar 1 menggambarkan hubungan antara variabel penelitian. Ini menghasilkan dua persamaan struktural berdasarkan diagram jalur pada Gambar 1 dibawah ini:

- a) Hubungan antara desentralisasi fiskal (X_1) dan *fiskal stress* (X_2) terhadap kinerja keuangan (X_3)

$$X_3 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

- b) Hubungan antara desentralisasi fiskal (X_1) dan *fiskal stress* (X_2) dan kinerja keuangan (X_3) terhadap Y

$$Y = b_3 X_1 + b_4 X_3 + b_5 X_2 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

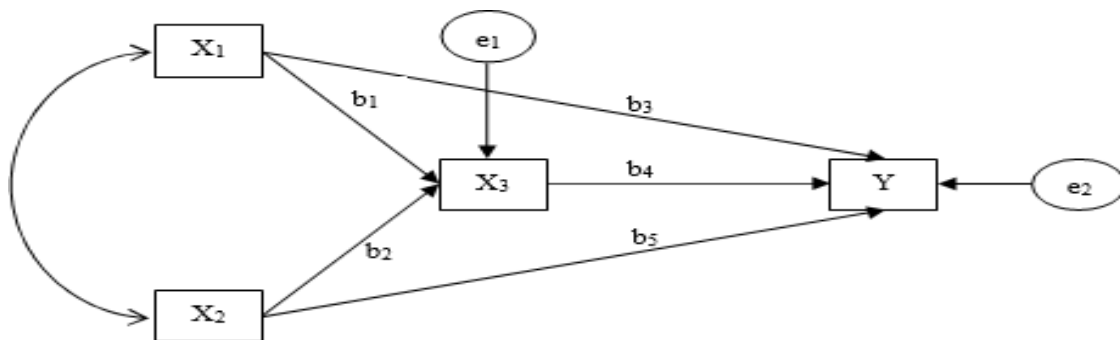
X_1 = adalah desentralisasi fiskal

X_2 = adalah *fiscal stress*

X_3 = adalah kinerja keuangan

Y = adalah pertumbuhan ekonomi

e_2 = adalah error 2



Gambar 1. Model Path Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- a) Pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan uji t, sedangkan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut :

$$z = \frac{ab}{S_{ab}} \dots\dots\dots (4.3)$$

Standar error koefisien a dan b ditulis dengan S_a dan S_b , besarnya standar error tidak langsung (indirect effect) S_{ab} dihitung dengan rumus berikut ini :

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2} \dots\dots\dots (4.4)$$

Keterangan:

a adalah koefisien tak standar pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi

b. adalah koefisien tak standar pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen

S_a adalah standar error pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi.

S_b adalah standar error pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pengaruh langsung antar variabel penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan, tekanan fiskal, dan desentralisasi fiskal semuanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil metode regresi sederhana pada model persamaan struktural 1 dan 2 digunakan untuk menghitung koefisien jalur dalam penelitian ini. Hasil tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut. Berdasarkan Tabel 2, desentralisasi fiskal (X_1) dan tekanan fiskal (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (X_3), diikuti oleh kinerja keuangan (X_3) dan desentralisasi fiskal (X_1).berpengaruh signifikan dan positif terhadap ekspansi ekonomi (Y).Gambar 2

menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

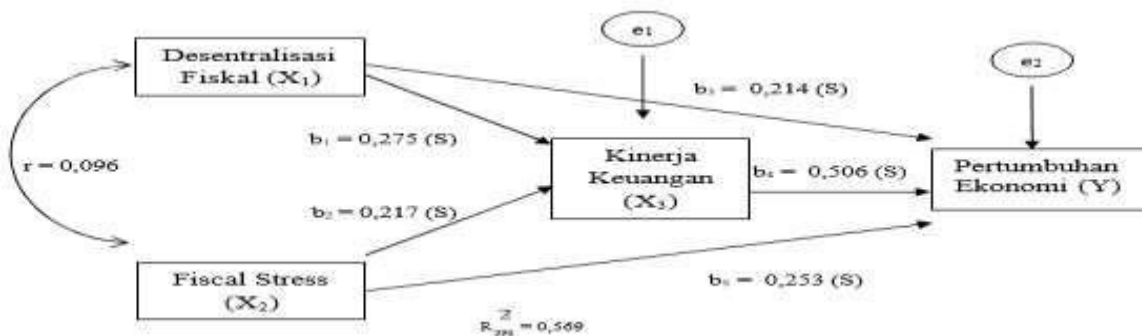
Tabel 2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standard Error	t hitung	P.Value	Keterangan
X1 → X3	0,275	0,065	2,878	0,005	Signifikan
X2 → X3	0,217	0,049	2,269	0,0025	Signifikan
X1 → Y	0,214	1,100	2,825	0,006	Signifikan
X2 → Y	0,253	0,818	3,394	0,001	Signifikan
X3 → Y	0,506	1,650	6,514	0,000	Signifikan

Sumber : Hasil Penelitian (diolah)

Analisis Ketepatan Model

Koefisien determinasi total merupakan salah satu cara agar analisis jalur dapat mengetahui seberapa akurat model tersebut. Dengan koefisien determinasi total sebesar 0,569 dari analisis jalur, dapat disimpulkan bahwa 56,9 persen data atau variasi data dapat dijelaskan oleh modelnya sedangkan sisanya 43,1 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.



Gambar 2. Diagram Jalur Variabel Hasil Penelitian Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh Tidak Langsung Desentralisasi Fiskal dan Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kinerja Keuangan

Pengujian pengaruh tidak langsung desentralisasi fiskal dan *fiscal stress* terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan dilakukan melalui uji Sobel, hasilnya disajikan pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Ringkasan Pengujian Pengaruh Tidak Langsung Desentralisasi Fiskal dan *Fiscal Stress* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kinerja Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Hubungan Variabel	a	Sa	b	Sb	z	Sig	Keterangan
Pengaruh Desentralisasi Fiskal melalui Kinerja Keuangan	0,188	0,065	10,751	1,650	9,324	0,000	Signifikan
Pengaruh Fiscal Stress melalui Kinerja Keuangan	0,112	0,049	10,751	1,650	12,369	0,000	Signifikan

Sumber : Hasil Penelitian (diolah)

Berdasarkan Tabel 3, pengaruh desentralisasi fiskal (X₁) dan fiskal stress (X₂) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dipengaruhi oleh variabel kinerja keuangan (X₃). Hal ini ditunjukkan dengan nilai z uji Sobel sebesar 9,324 dan 12,369, masing-masing, secara signifikan lebih tinggi dari nilai tabel 1,96.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan sangat dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal, seperti terlihat pada Tabel 2 diatas. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, kinerja keuangan daerah akan meningkat sebagai akibat dari kemampuan keuangan daerah untuk dikelola oleh daerah itu sendiri. Oleh karena itu, daerah harus mampu menyelidiki secara mandiri sumber-sumber keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Dalam hal ini sangat jelas terlihat bahwa kinerja keuangan berkorelasi langsung dengan desentralisasi fiskal. Agar daerah menjadi lebih mandiri. Cukup pemerintah daerah ke depan harus memprioritaskan peningkatan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangannya.

Volume 1 Nomor 2, 2022, hal. 1574-1577
E-ISSN 2800-1566 P-ISSN 2800-1574

Memberikan keleluasaan bagi daerah untuk melihat dan menentukan skala prioritas pembiayaan pembangunan. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah dan juga akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membelanjakan dana yang diperolehnya. Diharapkan kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan efek yang menguntungkan bagi kinerja keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengaruh *fiscal Stress* Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan Tabel 2 kinerja keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh tekanan fiskal. Daerah mengalami tekanan fiskal (tekanan fiskal) yang lebih besar daripada sebelum otonomi. Kabupaten diharapkan meningkatkan setiap potensi dan batas moneter untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Pemerintah biasanya menyelidiki kemungkinan penerimaan pajak meningkatkan penerimaan daerah selama masa tekanan fiskal yang tinggi. Shamsub dan Akoto (2004) [9] Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Setiyawan dan Adi (2006) [10] yang menemukan bahwa baik tingkat pertumbuhan pembangunan/belanja modal dan tingkat pertumbuhan PAD secara positif dipengaruhi oleh *fiscal stress*.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun melalui kinerja keuangan daerah, seperti terlihat pada Tabel 2 di atas. Ketika pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan dana yang tersedia untuk kepentingan umum atau masyarakat atau dana dalam APBD masih terserap terutama untuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan dari sisi penerimaan dan belanja sehingga ada program pembangunan yang pelaksanaannya belum tepat sasaran. anggaran APBD akan lebih fokus pada pembiayaan sektor publik dan masyarakat agar berdampak pada masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Pertumbuhan ekonomi di delapan negara mayoritas Muslim, antara lain Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki, dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal luar negeri. Desentralisasi fiskal luar negeri ternyata berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi masing-masing negara di negara-negara tersebut. Ekspansi ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, alih teknologi, dan peningkatan daya saing bisnis adalah hasil dari desentralisasi fiskal luar negeri. Lin dan Liu (2000) [11] yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dapat ditarik kesimpulan, seperti terlihat pada Tabel 2 diatas, bahwa tekanan fiskal berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun melalui kinerja keuangan daerah. pungutan wilayah telah menyebabkan badan publik di Kabupaten/Kota Aceh menghadapi tekanan moneter secara besar-besaran. Tingginya rasio realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap target PAD menunjukkan hal tersebut. Lebih khusus lagi, peningkatan tekanan keuangan. Dengan intensifikasi dan penyuluhan dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah. Tindakan atau upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dengan cara menghimpun lebih ketat, aktif, dan menyeluruh dikenal dengan istilah intensifikasi penerimaan daerah dapat ditingkatkan administrasi perpajakannya, sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah dapat ditingkatkan, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dapat ditingkatkan dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, serta dapat memanfaatkan teknologi IT. Upaya peningkatan pendapatan melalui identifikasi potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dikenal dengan istilah "ekstensifikasi pendapatan asli daerah".

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel 2 diatas, kinerja keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspansi ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya kinerja keuangan dalam mendorong ekspansi ekonomi. Setelah otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sejumlah besar uang. Jika kewenangan tersebut tidak dibarengi dengan kinerja keuangan atau efisiensi anggaran, maka dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan sering mengakibatkan pemborosan anggaran. Setiap tahun, pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan efisiensi anggaran dengan melaksanakan kebijakan dan program berdasarkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Kebijakan dan program tersebut antara lain pengurangan subsidi BBM dan listrik, pemutakhiran regulasi tentang perjalanan dinas ke luar daerah secara terus menerus, dan lelang barang dan jasa secara elektronik, transparansi anggaran melalui media elektronik, pengawasan dan audit keuangan yang lebih ketat, serta kebijakan lain untuk mendorong laju perekonomian dengan belanja pembangunan yang bersumber dari komponen APBD.

5. KESIMPULAN

Vol. 2, No. 1, 2022, pp. 1574-1574
Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal, fiskal stress, dan kinerja keuangan langsung signifikan terhadap kinerja keuangan, dan bahwa desentralisasi fiskal, fiskal stress, dan kinerja keuangan berpengaruh langsung signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua faktor tersebut tercermin dalam kinerja keuangan. Secara tidak langsung, pengaruh desentralisasi fiskal (X_1) dan fiskal stress (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dipengaruhi oleh variabel kinerja keuangan (X_3).

Berdasarkan temuan-temuan sebelumnya, disarankan agar Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh meningkatkan pendapatannya melalui intensifikasi dan perluasan guna meningkatkan kinerja keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Todaro, MP, 2003, *Economic Development*, Sixth Edition, Published by New York University.
- [2] Purba, Bonaraja et al, 2021, *Ekonomi Pembangunan*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- [3] Basmar, Edwin et al, 2021, *Ekonomi Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- [4] Nainggolan, Lora et al, 2021, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- [5] Idris Patarai 2016, *Kinerja Keuangan Daerah*, Vol. 1, Ed. 2, De La Macca, Makassar.
- [6] Sukarsa, Made, dan Sang M. Muryawan, 2016, Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. No. 6, Vo. 5, 2337-3067, <https://www.neliti.com/publications/44769/pengaruh-desentralisasi-fiskal-fiscal-stress-dan-kinerja-keuangan-daerah-terhada>
- [7] Manafe, Mesri & Ena, Zet & Adu, Salmun, 2019, *FISCAL STRESS: Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Wahana. 21. 125-135. 10.35591/whn.v21i2.152.
- [8] Hasugian, Andros M.P, 2006, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat*. Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- [9] Shamsub, Hannarong., Joseph B Akoto, 2004, State and Local Fiscal Structures and Fiscal stress, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 16, No. 1, Hal: 40-61.
- [10] Setiyawan, Budi dan Adi, Priyohari, 2006, *Pengaruh Fiscal stress terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli dan Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- [11] Lin, Justin Yifudan Liu, Zhiqiang, 2000, Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol. 49, Hal :1 – 21.